

FROM REGULATION TO COMMUNITY RESILIENCE: EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS REGULATION NO. 128 OF 2011 ON DISASTER PREPAREDNESS VILLAGES IN GARUT REGENCY, INDONESIA

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v8i1.1828>

Rajendra Panggita Vasthu
Poltekesos Bandung
Bandung, Indonesia
rajendrapanggita@gmail.com

Tuti Kartika
Poltekesos Bandung
Bandung, Indonesia
kartika_64@yahoo.com

Milly Mildawati
Poltekesos Bandung
Bandung, Indonesia
millystks@gmail.com

Journal History:
Received May 31st 2026
Accepted Aug 04th 2026

ABSTRACT Kampung Siaga Bencana (KSB) is a policy regulated under Minister of Social Affairs Regulation No. 128 of 2011 aimed at enhancing community-based disaster preparedness. Garut Regency, as a disaster-prone area, has implemented the KSB program in several locations; however, its implementation still faces various challenges. This study aims to evaluate the implementation of disaster management activities by KSB in Garut Regency in accordance with the regulation, as well as to formulate policy improvement recommendations. This research employs an evaluative design using a quantitative approach and a descriptive survey method. The evaluation framework is based on six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study population consists of 120 KSB members from two selected units. Data were collected through questionnaires, interview and documentation study, and analyzed using descriptive statistics to determine the level of achievement for each criterion. The results show that effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness are categorized as nearly achieved. Overall, the implementation of KSB activities in Garut Regency has not yet reached optimal performance, particularly due to limited activities in the pre-disaster and post-disaster phases. Which is largely attributed to the insufficient knowledge and skills of KSB members in carrying out these activities. Therefore, this study recommends the development of comprehensive technical guidelines that provide detailed procedures, step-by-step actions for implementing KSB disaster management activities across the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases, as mandated by Minister of Social Affairs Regulation No. 128 of 2011.

KEYWORDS: Policy Evaluation; Disaster Management; Kampung Siaga Bencana; Disaster Social Work Practice; Garut Regency

ABSTRAK Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Kabupaten Garut sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi telah mengimplementasikan program KSB di beberapa lokasi, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh KSB di Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan tersebut, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Penelitian ini menggunakan desain evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei deskriptif. Kerangka evaluasi mengacu pada enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responivitas, dan ketepatan. Populasi penelitian terdiri atas 120 anggota KSB dari dua unit yang dipilih. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan tingkat pencapaian setiap kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responivitas, dan ketepatan berada pada kategori hampir tercapai. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan KSB di Kabupaten Garut belum mencapai kinerja yang optimal,

terutama karena terbatasnya pelaksanaan kegiatan pada tahap prabencana dan pascabencana yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota KSB dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif yang berisi rincian langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tiga fase penanggulangan bencana untuk KSB sebagaimana yang diamanatkan dalam permensos 128 tahun 2011.

KataKunci: Evaluasi Kebijakan; Penanggulangan Bencana; Kampung Siaga Bencana; Praktik Pekerjaan Sosial dengan Bencana; Kabupaten Garut

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sekaligus memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik aktif, sehingga memicu terbentuknya jalur vulkanik dan meningkatkan potensi terjadinya bencana geologis maupun hidrometeorologi (Shalih et al., 2023). Situasi tersebut menuntut adanya upaya penanggulangan bencana yang tidak hanya bersifat responif, tetapi juga menekankan pada kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia menginisiasi program Kampung Siaga Bencana (KSB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011. KSB dirancang sebagai pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas lokal, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Namun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi KSB di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian Cahyono (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya kegiatan pelatihan menyebabkan pelaksanaan KSB lebih terfokus pada fase tanggap darurat. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Salim et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas KSB masih rendah, terutama pada fase prabencana dan pascabencana. Selain itu, Cahyono (2019) menyoroti lemahnya aspek mitigasi, edukasi, serta dukungan psikososial dalam implementasi KSB. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peran KSB belum berjalan secara komprehensif sesuai dengan mandat kebijakan.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan KSB di Kabupaten Garut yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan kajian risiko bencana yang disusun oleh Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana (2021) Kabupaten Garut memiliki indeks risiko yang tinggi dengan frekuensi kejadian bencana yang signifikan, terutama bencana hidrometeorologi. Meskipun KSB telah diimplementasikan, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan kebijakan, khususnya pada fase prabencana dan pascabencana. Sebaliknya, fase tanggap darurat cenderung lebih optimal. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pelatihan, serta belum adanya panduan operasional yang rinci dalam pelaksanaan kegiatan KSB.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi KSB, masih terbatas kajian yang secara spesifik mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan secara komprehensif pada seluruh fase penanggulangan bencana. Selain itu, belum banyak penelitian yang menawarkan solusi operasional yang konkret untuk mengatasi kesenjangan implementasi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menguji enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn secara berimbang di sepanjang tiga fase penanggulangan bencana. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga diwujudkan melalui formulasi solusi operasional terukur berbentuk *policy paper*. Penyusunan *policy paper* ini berfungsi sebagai jembatan antara temuan evaluatif akademis dan pengambilan keputusan praktis, sehingga mampu memberikan panduan rekomendasi yang konkret, terukur, dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi kesenjangan implementasi KSB di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan KSB menggunakan enam kerangka evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responivitas, dan ketepatan di Kabupaten Garut pada tiga fase penanggulangan bencana serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan penguatan pelaksanaan program KSB di Kabupaten Garut.

METODE

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang KSB di Kabupaten Garut melalui angka – angka yang dapat diukur menggunakan statistik sebagai alat perhitungan, berdasarkan hal tersebut penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei deskriptif. Penentuan lokasi sampel KSB dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria KSB yang masih aktif menyampaikan laporan kegiatan bulanan ke Dinas Sosial dan telah melaksanakan kegiatan pada tiga fase penanggulangan bencana, sehingga terpilih KSB Desa Paas dan KSB Desa Sarimukti. Dari kedua KSB tersebut, terdapat populasi sebanyak 120 orang anggota aktif. Teknik

penarikan sampel anggota KSB dilakukan menggunakan teknik total sampling (sensus), di mana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria keaktifan sebanyak 120 orang dijadikan sebagai responden penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penggunaan kuesioner dipilih karena efisien dalam menjangkau responden pada wilayah yang luas. Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan teknik korelasi Bivariate Pearson dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) terhadap 30 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS. Hasil uji menunjukkan nilai sebesar 0,957, yang lebih tinggi dari batas minimal 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Selain data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, dengan mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan informan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen seperti buku, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil data penelitian primer tersebut dianalisis dengan melihat skor indeks yang diperoleh setiap parameternya dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total skor riil kriteria}}{\text{Total maksimum kriteria}} \times 100$$

Keterangan:

Skor riil kriteria = Jumlah skor yang diperoleh responden
Skor maksimum kriteria = Jumlah skor maksimal ideal

Skor indeks yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan sesuai kriteria evaluasi yang diukur pada tiap kriteria. kriteria tersebut didapatkan dari perhitungan total seluruh pernyataan yang menghasilkan suatu standar, adapun peneliti mencontohkan kriteria efektivitas sebagai standar sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Indeks Kriteria Efektivitas

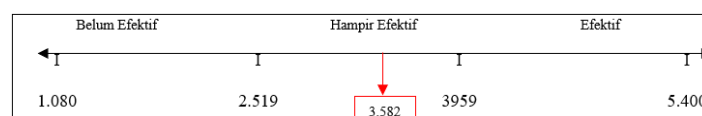
Nilai Indeks	Kategori
73.33 – 100.00	Efektif
46.67 – 73.07	Hampir Efektif
≤46.40	Tidak Efektif

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSB di Kabupaten Garut masih memiliki berbagai tantangan dalam implementasinya melakukan kegiatan pada tiga fase penanggulangan bencana yang dievaluasi di setiap kriteria evaluasi kebijakan yang dijelaskan pada subpembahasan berikut:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria efektivitas menekankan pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi KSB diarahkan pada konsep penanggulangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) sebagaimana dikemukakan oleh Andhika (2018) yang menekankan penguatan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap intervensi eksternal. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh fase penanggulangan bencana, meliputi prabencana dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan, tanggap darurat dengan tujuan pertolongan korban, dan pascabencana dengan tujuan pemulihan kondisi korban bencana. Adapun hasil perhitungan kriteria efektivitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 1. Garis Kontinum Kriteria Efektivitas
Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

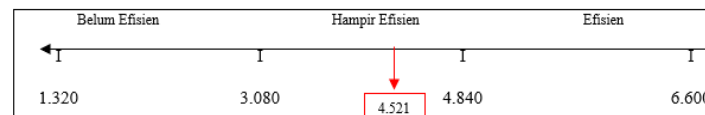
Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria efektivitas kegiatan KSB sebesar 3.582 dari skor maksimum 5.400, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir efektif”.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan KSB belum efektif pada fase prabencana dan pascabencana. KSB cenderung lebih menitikberatkan kegiatan pada fase tanggap darurat dengan tingkat keaktifan yang tinggi ditunjukkan dengan melakukan tanggap darurat pada desa tetangga. Kondisi ini kurang selaras dengan tujuan utama pembentukan KSB yang seharusnya memprioritaskan fase prabencana, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan oleh Purnomo et al. (2025) sebagai pergeseran paradigma, di mana fase tanggap darurat lebih mendapat perhatian karena sifatnya yang mendesak dan lebih terlihat sebagai indikator keberhasilan di mata masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas KSB belum sepenuhnya mandiri jika ditinjau dari konsep PRBKK yang menekankan pentingnya kemampuan komunitas dalam mengelola risiko bencana secara mandiri pada seluruh fase penanggulangan bencana.

EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria efisiensi berkaitan dengan penggunaan berbagai sumber daya seperti waktu, manusia, material, dan biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun hasil perhitungan kriteria efisiensi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 2. Garis Kontinum Kriteria Efisiensi

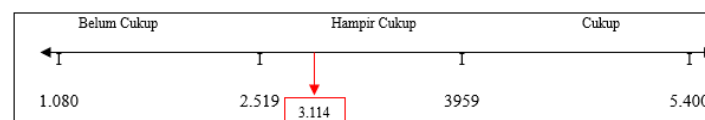
Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria efisiensi kegiatan KSB sebesar 4.521 dari skor maksimum 6.600, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir efisien”. Temuan di lapangan menemukan KSB memiliki beberapa jenis sumber daya, namun secara umum kondisinya masih terbatas. Dari aspek waktu, KSB telah memiliki pengelolaan jadwal kegiatan, meskipun pelaksanaannya belum konsisten. Dari aspek sumber daya manusia, KSB memiliki struktur anggota yang terbagi dalam beberapa seksi dan tersebar di berbagai wilayah desa, namun tidak seluruh anggota aktif berpartisipasi. Dari aspek material, KSB telah memiliki sejumlah peralatan penunjang yang disimpan di lumbung sosial, tetapi jumlah dan kelengkapannya masih terbatas. Pada aspek dana KSB pada dasarnya belum memiliki sumber dana yang tetap dan masih bergantung pada dukungan kepala desa serta swadaya anggota.

Walaupun KSB memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan kegiatan pada tiga fase penanggulangan bencana namun, KSB tetap berupaya mempertahankan eksistensinya. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan adaptasi yang dimiliki KSB. Hal ini sejalan dengan konsep constraint-based efficiency yang dikemukakan oleh Marsela & Fitriana (2025) di mana keterbatasan justru mendorong organisasi untuk lebih selektif dalam menggunakan sumber daya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep frugal innovation yang disebutkan oleh Ukbaeva et al. (2025) yaitu munculnya inovasi sebagai respon terhadap keterbatasan. Berdasarkan hal tersebut, kemampuan efisiensi yang terjadi pada KSB merupakan bentuk respon adaptif terhadap tekanan lingkungan.

KECUKUPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria kecukupan digunakan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan kepuasan dari penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini, kriteria kecukupan dikaji berdasarkan tiga fase penanggulangan bencana. Adapun hasil perhitungan kriteria kecukupan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:



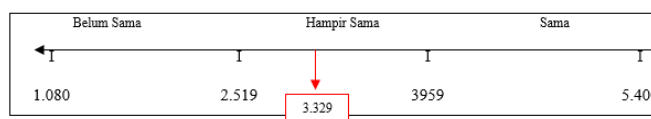
Gambar 3. Garis Kontinum Kriteria Kecukupan

Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria kecukupan kegiatan KSB sebesar 3.114 dari skor maksimum 5.400, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir cukup”. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat banyak item kegiatan pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang dinilai belum memadai untuk mewujudkan desa yang dihuni oleh KSB menjadi mandiri dalam menghadapi bencana. Mayoritas item yang belum memenuhi kriteria kecukupan merupakan kegiatan yang jarang dilaksanakan oleh KSB, seperti simulasi bencana, serta kegiatan pemulihan korban bencana. Selain itu, terdapat pula beberapa kegiatan yang pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan regenerasi, pada sumber daya manusia.

KESAMAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria kesamaan berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak pihak tanpa memandang suku, agama, dan ras (SARA). Dalam konteks penelitian ini, seluruh pelaksanaan kegiatan KSB sebagai bentuk pelayanan idealnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun hasil perhitungan kriteria kesamaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:

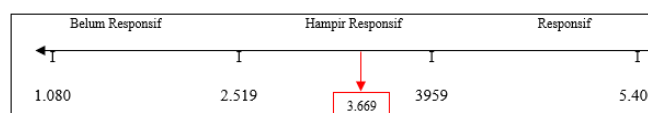


Gambar 4. Garis Kontinum Kriteria Kesamaan
Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria kesamaan kegiatan KSB sebesar 3.329 dari skor maksimum 5.400, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir sama”. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan prinsip kesamaan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini dilihat pada fase prabencana, manfaat kegiatan cenderung hanya dirasakan pada saat pembentukan KSB oleh Kementerian Sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut masih terbatas dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Pada fase pascabencana, kegiatan juga belum dilaksanakan secara merata sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas. Berbeda dengan kedua fase tersebut, pada fase tanggap darurat KSB menunjukkan kinerja yang lebih inklusif. KSB secara aktif dan responif memberikan pertolongan kepada seluruh warga terdampak, bahkan secara sukarela membantu masyarakat di desa lain yang belum memiliki KSB. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa implementasi KSB masih berorientasi pada pendekatan reaktif dibandingkan dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif.

RESPONSIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kegiatan KSB dinilai responsif jika kegiatan pada fase prabencana disusun sesuai dengan kebutuhan atau risiko bencana yang terjadi di desa tersebut. pada kegiatan fase tanggap darurat dinilai responif jika pertolongan korban bencana dilakukan secara cepat, dan kegiatan pada fase pascabencana dikatakan responif jika semua kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban bencana agar kondisi mereka cepat pulih. Adapun hasil perhitungan kriteria responsivitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:



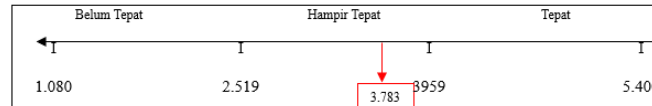
Gambar 5. Garis Kontinum Kriteria Responsivitas
Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria Responsivitas kegiatan KSB sebesar 3.669 dari skor maksimum 5.400, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir responsif”. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan kegiatan pada fase prabencana dan tanggap darurat dinilai responsif karena telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah rawan bencana. Namun demikian, pada fase pascabencana, kegiatan KSB dinilai belum responif karena masih minimnya intervensi yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi kegagalan untuk mengintegrasikan fase pascabencana ke dalam program kerja utama KSB karena ketidakpahaman dalam menentukan kebutuhan. Akbar & Sundoyo (2022) menjelaskan bahwa fase pascabencana menuntut pemahaman terhadap kebutuhan yang bersifat laten dan kompleks (complex needs), seperti pemulihan trauma psikososial, rehabilitasi mata pencaharian, dan rekonsiliasi sosial. Ketidakmampuan untuk mengenali dan merumuskan kebutuhan non-fisik ini sering kali menyebabkan hanya cukup memberikan bantuan sosial saja

KETEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Kriteria ketepatan berkaitan sejauh mana suatu kebijakan atau program benar-benar tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kegiatan KSB dinilai tepat jika kegiatan pada fase prabencana disesuaikan dengan risiko bencana yang dihadapi, pada fase tanggap darurat dinilai tepat jika menolong korban bencana dengan standar yang berlaku, serta pada fase pascabencana dinilai tepat jika memulihkan kondisi korban bencana sesuai standar yang berlaku. Adapun hasil perhitungan kriteria ketepatan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana KSB ditampilkan pada gambar garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 6. Garis Kontinum Kriteria Ketepatan

Sumber: Identifikasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar garis kontinum, total skor riil kriteria ketepatan kegiatan KSB sebesar 3.783 dari skor maksimum 5.400, sehingga secara keseluruhan berada pada kategori “hampir tepat”. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan KSB telah mengarah pada kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai sehingga mengurangi optimalitas program yaitu ketersediaan sarana yang dimiliki KSB. Sarana yang ada belum sepenuhnya tepat untuk jenis risiko dan kebutuhan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Sementara itu, pada fase pascabencana, kembali menjadi menjadi aspek yang paling lemah. Beberapa kegiatan utama seperti pertemuan rutin dengan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pelaksanaan asesmen kebutuhan korban bencana dinilai belum tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan utama korban bencana. Ketidaktepatan pada fase pascabencana ini diindikasikan oleh Puspita (2018) bahwa KSB belum memiliki metode yang baik dalam menentukan prioritas kebutuhan korban bencana secara sistematis dan berbasis data. Ketiadaan mekanisme asesmen yang terstruktur menyebabkan kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat umum dan tidak spesifik menjawab kebutuhan mendesak maupun kebutuhan jangka panjang masyarakat terdampak.

PENYEBAB MUNCULNYA MASALAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian penyebab munculnya masalah kebijakan yaitu pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh KSB mayoritas masuk pada kategori “hampir” yaitu: a) Kurangnya dukungan pemerintah desa, KSB belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa sehingga tidak memperoleh dukungan kebijakan maupun pendanaan. Pemerintah desa masih menganggap KSB sebagai tanggung jawab Dinas Sosial, bukan bagian dari kewenangan desa; b) Kurangnya pelatihan dan pembinaan lanjutan, Pelatihan KSB hanya berlangsung tiga hari dan bersifat pengenalan umum, sehingga tidak cukup untuk membekali anggota dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan; dan c) Kurangnya monitoring dan pembinaan, Pasca pembentukan, KSB tidak mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara rutin dari instansi terkait. Ketiadaan pembinaan berkelanjutan berdampak pada stagnansi kegiatan serta rendahnya peningkatan kapasitas anggota.

ALTERNATIF KEBIJAKAN OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KSB

Berdasarkan penyebab munculnya masalah kebijakan tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang peneliti susun selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh para stakeholders: a) Pembuatan Surat Keputusan Dinas Sosial Mengenai Pelatihan dan Pembekalan Lanjutan (Refreshment Training) bagi Anggota KSB, alternatif ini menekankan penguatan kapasitas SDM melalui pembuatan surat Keputusan Dinas Sosial agar tercipta pelatihan lanjutan; b) Pembuatan peraturan bupati yang berisi Integrasi Kegiatan KSB kedalam Perencanaan Desa, alternatif ini fokus pada penguatan dukungan kelembagaan dengan menetapkan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan, fasilitasi, dan keberlanjutan KSB; dan c) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Penanggulangan Bencana bagi KSB, alternatif ini berisi rincian langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tiga fase penanggulangan bencana untuk KSB.

Berdasarkan tiga alternatif kebijakan tersebut, peneliti merekomendasikan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penanggulangan bencana bagi KSB sebagai prioritas pelaksanaan. Adapun alternatif kebijakan tersebut dipilih setelah menempati urutan pertama dalam analisis seleksi alternatif dengan empat kriteria yaitu: a) Teknis; b) Ekonomi dan finansial; c) Politik; dan d) Administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh KSB secara umum masih menyisakan sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya skor yang didapat pada enam kriteria evaluasi kebijakan yang didapat. Terdapat enam kriteria kebijakan yang dievaluasi, keenam kriteria tersebut masuk pada kategori hampir. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan adanya kecenderungan pergeseran paradigma implementasi KSB di tingkat lokal, di mana keaktifan KSB lebih banyak diukur dari respon tanggap darurat dibandingkan dengan penguatan kapasitas masyarakat pada fase prabencana dan pemulihan pada fase pascabencana. Temuan ini memperkaya kajian evaluasi kebijakan sosial, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh capaian output, tetapi juga oleh keseimbangan antar fase penanggulangan bencana.

Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Garut dan desa disarankan untuk memperkuat kebijakan dan dukungan terhadap KSB melalui pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh peneliti yang memuat dukungan secara politik maupun dukungan sumber daya yang lebih memadai, baik dari aspek anggaran, sarana

prasarana, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tetap mengkaji evaluasi kebijakan penanggulangan bencana, namun dengan menggunakan kriteria atau kerangka evaluasi yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam dan komprehensif dalam menilai implementasi kebijakan KSB, mengingat setiap model evaluasi memiliki keunggulan dan fokus analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Sundoyo. (2022). Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Indonesia*, 22(1), 58–69. <https://doi.org/10.53640/jemi.v22i1.1053>
- Andhika, A. N. (2018). Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Penguatan Komunikasi Interpersonal dalam Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 313 Desa Langensari kecamatan Lembang. *Pekerjaan Sosial*, 17(2), 1–14. <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i2.142>
- Cahyono, S. A. T. (2018). Bertahan Hidup di Bawah Bayang-Bayang Bencana Kemampuan Kampung Siaga Bencana (KSB) Dalam Penanganan Korban Bencana Alam. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(1), 73–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v42i1.2252>
- Cahyono, S. A. T. (2019). Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3), 237–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v43i3.2138>
- Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana. (2021). *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Barat 2022–2026*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin, Ed.; S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto, Trans.; Cetakan Kelima). Gadjah Mada University Press. <https://www.scribd.com/document/451438127/William-N-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Pul-z-lib-org-pdf>
- Marsela, A. R., & Fitriana, N. (2025). Pelaksanaan Prinsip Efisiensi Sumber Daya dalam Green Economy oleh UMKM Kuliner dan Dampaknya pada Lingkungan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 162–173. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3818>
- Purnomo, H., Latumanuwu, L., Sunarty, R., Laoh, J. M., Kawatu, Y. T., Amak, asrori, Pamudi, B. F., Tukatman, Tamunu, E., Khaira, N., Bangu, Suwarja, & Adam, Y. (2025). *Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana* (L. O. Alifariki, Ed.; Cetakan Pertama). PT Media Pustaka Indo.
- Puspita, N. (2018). Metode Post Disaster Need Assessment (PDNA) Dalam Evaluasi Kelayakan Gedung Negara Studi Kasus Gedung Bpbd Kota Pagar Alam. *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik*, 6(1). <https://doi.org/10.36982/jtg.v6i1.421>
- Salim, K., Pristina, D., Christian, S., & Pramitasari, A. (2022). Evaluasi Efektivitas Program Kampung Siaga Bencana (KSB) Pegangsaan Dua Studi Kasus Rw 03. *Jurnal Pelita Kota*, 3(2), 189–206. <https://doi.org/10.51742/pelita.v3i2.581>
- Shalih, O., Adi, A. W., Wiguna, S., Shabrina, F., Rizqi, A., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Septian, R. T., Syauqi, & Alfian, A. (2023). *RBI Risiko Bencana Indonesia BNPB “Memahami Risiko Sistemik di Indonesia”* (R. Yunus, Ed.; Cetakan Pertama). Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- Ukbaeva, Z., Wöllner, T., & Bican, P. M. (2025). Constraints and Frugal Innovation: Enabling Sustainable Production Through the New Product Development Process. *Sustainable Development*, 34(2), 1392–1413. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.70399>